

Partisipasi Wanita dalam Kegiatan Usaha Koperasi Unit Desa (KUD)
(M. Lies Endarwati)

PARTISIPASI WANITA DALAM KEGIATAN USAHA KOPERASI UNIT DESA (KUD)

Oleh:
M. Lies Endarwati^{*)}

Abstract

This research attempts to see empirically women's role in Rural Unit Cooperative Activities in gender perspective. The research population is all the members of Rural Unit Cooperative (KUD) in Daerah Istimewa Yogyakarta province. Data are obtained by using questionnaire in close and open format. The data analysis are performed using software SPSS by the univariate and bivariate descriptive techniques. The conclusions of this study are as follows: (1) The participation level of women compared with men is qualitatively lower viewed from their status in KUD; (2) The factor promoting women to participate is that because KUD really helps in fulfilling the family economic needs, while for men because KUD really helps in fulfilling the needs of all members; (3) The factor hampering women to participate is that because KUD is not able to help in fulfilling the member's needs; (4) The women opportunity to be a manager is greater than as a official chairperson, and higher than man; (5) The most acceptable leadership position as a official chairperson; (6) Women still tend to be neglected in getting the opportunity to improve the personal quality in various form of training activities.

Keywords: Equally Man and Women (Kemitrasejajaran), Gender, Rural Unit Cooperative Activities, Women's Participation.

PENDAHULUAN

Kebijakan pemerintah telah menetapkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan, wanita merupakan mitra sejajar pria yang mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama

^{*)} Penulis adalah Staf Pengajar FIS UNY.

dengan kaum pria, serta mempunyai peranan penting dalam keluarga. Wanita di Indonesia mempunyai kesempatan yang sama dengan kaum pria untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Apakah semua wanita Indonesia di mana pun dan dalam kondisi apa pun dapat memanfaatkan kesempatan tersebut secara seimbang dibandingkan dengan pria? Belum ada jawaban yang kauklusif terhadap pertanyaan ini. Oleh karena itu, perlu ada penelitian yang berupaya mengungkap partisipasi wanita dalam berbagai aspek pembangunan dengan perspektif jender. Hasil sensus penduduk menunjukkan sebagian besar penduduk Indonesia berada di wilayah perdesaan. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam pembangunan perdesaan perlu ditumbuhkan. Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai wahana penghimpun potensi ekonomi masyarakat perdesaan perlu diperkokoh dan dimantapkan. Upaya tersebut perlu dilakukan sebagai sarana strategik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Akan tetapi, dalam pengembangan KUD masih banyak masalah yang harus diselesaikan, terutama masih lemahnya kemampuan KUD dalam bersaing di pasar, sehingga peluang usaha yang ada tidak dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pangsa pasar KUD. Hal ini disebabkan antara lain: (a) masih terbatasnya kualitas dan partisipasi anggota masyarakat, (b) masih

terbatasnya sumber daya manusia pengelola KUD yang profesional.

Melihat kenyataan itu, peneliti ingin mengetahui sejauh mana partisipasi wanita dalam kegiatan usaha Koperasi Unit Desa, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi dengan menggunakan perspektif jender, serta bagaimana peluang wanita untuk menduduki posisi kepemimpinan.

Menurut Gerungan (1972), partisipasi merupakan tingkah laku manusia dalam wujud ikut serta dalam suatu kelompok atau kegiatan, sehingga partisipasi ini dapat dikatakan merupakan suatu aktivitas. Koentjaraningrat (1981) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan menyangkut dua tipe yang pada prinsipnya berbeda, yaitu: (a) partisipasi dalam aktivitas-aktivitas bersama dalam proyek-proyek pembangunan yang khusus, (b) partisipasi sebagai individu di luar aktivitas-aktivitas bersama dalam pembangunan. Dalam tipe pertama masyarakat desa diajak, diperintah oleh pamong desa dan wakil-wakil dari berbagai departemen untuk berpartisipasi, dan menyumbangkan tenaga dan hartanya untuk kegiatan-kegiatan pembangunan yang khusus, yang biasanya bersifat fisik. Pada tipe kedua, tidak ada aktivitas bersama khusus tetapi ada proyek-proyek pembangunan, biasanya tidak bersifat fisik dan tidak memerlukan suatu partisipasi masyarakat atas perintah dan ajakan dari atasannya tetapi atas

kemauan sendiri. Misalnya, partisipasi masyarakat untuk menjadi akseptor KB, menjadi anggota Bimas, ikut Pemilu, menabung di Simpedes, menjadi anggota KUD, dan sebagainya. Penelitian ini mengacu pada tipe kedua dari konsep Koentjaraningrat.

Koperasi Unit Desa sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial agar dapat berkembang baik memerlukan partisipasi dari anggota dan masyarakat sekitar pada umumnya. Ibnu Sujono (1983), mengatakan bahwa maju mundurnya KUD ditentukan oleh mereka yang terlibat dalam kegiatan KUD dan pada akhirnya bertanggung jawab sepenuhnya pada anggota sendiri.

Untuk mengukur partisipasi dalam koperasi ada berbagai indikator. Menurut Muchlis Yahya (1985), indikator yang digunakan untuk mengukur partisipasi dalam koperasi sebagai berikut: kerajinan dan ketepatan membayar simpanan; seringnya menghadiri rapat anggota; motivasi menjadi anggota; pengetahuan tentang perkoperasian; ketepatan mengembalikan pinjaman (khusus untuk koperasi simpan pinjam); frekuensi penggunaan jasa koperasi. Menurut Amin Aziz (1983), partisipasi anggota dalam koperasi dapat diukur melalui: keterlibatan anggota dalam kegiatan koperasi; kemauan anggota untuk berinisiatif dan berkreasi dalam koperasi; dukungan dan tanggung jawab anggota dalam kegiatan koperasi.

Kemajuan dan keberhasilan peningkatan kedudukan dan peranan wanita di berbagai bidang kehidupan dan dalam segenap kegiatan pembangunan, yang mencerminkan persamaan kedudukan, hak, kewajiban, peranan dan kesempatan antara wanita dan pria sesuai dengan falsafah dan budaya bangsa, diusahakan dengan senantiasa mengarah pada terwujudnya kemitrasejajaran yang selaras, serasi, dan seimbang antara pria dan wanita. Dalam kehidupan sehari-hari, kemitrasejajaran yang harmonis ditandai dengan adanya sikap dan perilaku saling peduli, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, dan saling mengisi antara pria dan wanita dalam suasana kebersamaan, kerja sama, dan kesetiakawanan, dalam proses pembangunan, termasuk dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Untuk mengetahui apakah pria dan wanita telah menjadi mitra sejajar yang selaras, serasi, dan seimbang, antara lain dapat dipergunakan berbagai kriteria yaitu seberapa besar: *partisipasi aktif* wanita sebagai mitra sejajar pria baik dalam perumusan kebijaksanaan atau pengambilan keputusan dan perencanaan maupun dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan; *manfaat* yang diperoleh wanita dari hasil pelaksanaan berbagai kegiatan, baik sebagai pelaku maupun sebagai pemanfaat dan penikmat hasilnya; *akses dan kontrol/penguasaan* wanita terhadap berbagai sumber

daya pembangunan baik sumber daya manusia, alam maupun berbagai sumber daya pembangunan lain seperti IPTEK, informasi dan dana; *dampak* terhadap kedudukan dan peranan wanita.

Menyadari akan pentingnya hubungan wanita dan pria dalam upaya meningkatkan persamaan hak, kewajiban, kedudukan, peranan, dan kesempatan pria dan wanita dalam pembangunan di berbagai bidang, maka fokus penanganan bagi kemajuan, kedudukan, dan peranan wanita tidak semata-mata ditujukan kepada wanita tetapi lebih ditujukan kepada hubungan wanita dan pria yang kemudian dikenal sebagai "Pendekatan Jender". Jender yang merupakan rekayasa sosial, tidak bersifat universal dan memiliki identitas yang berbeda-beda, yang dipengaruhi baik oleh faktor-faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, adat istiadat, agama, etnik, golongan, maupun faktor sejarah, waktu dan tempat serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengingat bahwa jender sebagai hasil rekayasa sosial, maka dapat menyebabkan timbulnya ketimpangan hubungan dan pembagian kerja antara pria dan wanita, yang sering merugikan wanita.

Untuk mencegah terjadinya kesenjangan dan ketimpangan sebagai akibat adanya perbedaan peranan antara pria dan wanita, berdasarkan rekayasa sosial, maka masyarakat Indonesia perlu mewujudkan dan memiliki identitas jender yang mencerminkan wawasan kemitrasejajaran yang selaras, serasi, dan seimbang

antara pria dan wanita. Agar dapat mewujudkan identitas jender seperti dimaksud, maka sedapat mungkin harus dapat dihilangkan kesenjangan hubungan dan pembagian kerja antara pria dan wanita dalam berbagai bidang kehidupan dengan memperhatikan kodrat, harkat, dan martabatnya. Untuk itu, perlu diketahui latar belakang kondisi dan masalah yang menjadi penyebabnya dengan menggunakan teknik analisis jender. Teknik analisis jender yang dikembangkan di Indonesia adalah suatu teknik analisis untuk mengetahui profil kedudukan dan peranan wanita dalam pembangunan di berbagai bidang. Dengan mengetahui profil tersebut termasuk tantangan, hambatan dan peluang, kesenjangan dan ketimpangan hubungan pembagian kerja antara pria dan wanita, beserta latar belakangnya, upaya peningkatan peranan dan kedudukan wanita dapat dilakukan sehingga kemitrasejajaran wanita dan pria yang selaras, serasi, dan seimbang dapat diwujudkan.

Cara Penelitian

Populasi penelitian ini adalah seluruh anggota Koperasi Unit Desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta baik pria maupun wanita. Besarnya sampel ditetapkan sebanyak 135 orang, dengan menggunakan *multistage sampling*. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive random sampling*.

Secara keseluruhan, sampel penelitian ini seharusnya 135 orang. Meskipun demikian, *responce rate* responden terhadap kuesioner yang telah diberikan kepada mereka ternyata tidak begitu tinggi, sehingga sampel riil, dalam arti responden yang bersedia mengembalikan kuesioner, adalah 78 orang. Keadaan ini dapat dipandang sebagai keterbatasan penelitian ini. Meskipun demikian, responden yang bersedia mengembalikan kuesioner telah menggambarkan perspektif jender seperti yang diharapkan, dan juga telah memenuhi *sampling frame* yang cukup baik, karena dari 78 orang responden itu terdiri atas: (a) pria 33 orang (42,30%); dan (b) wanita 45 orang (57,70%).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Status dalam KUD

Tabel 1. Profil Status dalam KUD

Status	Wanita	Pria
	%	%
Pengurus	2,4	12,5
Badan Pemeriksa	0	3,1
Manajer	0	3,1
Ketua Pengurus	1,4	0
Karyawan	59,5	43,8

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi wanita dibandingkan pria dilihat dari status dalam KUD ataupun dari

Partisipasi Wanita dalam Kegiatan Usaha Koperasi Unit Desa (KUD) (M. Lies Endarwati)

aspek manajerial secara kuantitatif lebih tinggi pria karena pria dapat berpartisipasi dengan baik pada hampir semua aspek organisasi. Adapun partisipasi tertinggi wanita hanya sebagai karyawan. Hal ini secara kualitatif rendah dibandingkan dengan status lainnya apabila dilihat dari aspek manajerial. Menurut kriteria kemitrasejajaran, dapat disimpulkan bahwa partisipasi dan akses wanita terhadap KUD sebagai sumber daya pembangunan masih rendah.

Pemahaman terhadap AD dan ART

Tabel 2. Profil Pemahaman terhadap AD dan ART

Keterangan	Wanita	Pria
	%	%
Paham	85,7	90,3
Patuh	80,5	65,6

Tabel di atas menunjukkan bahwa wanita lebih dapat mematuhi AD/ART dibandingkan pria, meskipun tingkat pemahaman wanita terhadap AD/ART tidak sebaik pria. Hal ini mengindikasikan bahwa wanita lebih patuh terhadap suatu peraturan, sedangkan pria lebih realistis dalam memandang realitas kehidupan di KUD. Selain itu menunjukkan pula bahwa kualitas intelektual wanita masih lebih rendah dibanding pria karena tingkat pemahaman wanita terhadap AD/ART tidak sebaik pria.

Partisipasi dalam Kegiatan KUD

Partisipasi dalam kegiatan KUD dilihat dari dua aspek kegiatan yaitu kegiatan perencanaan dan kegiatan pelaksanaan (implementasi) rencana itu sendiri. Tingkat partisipasi dalam kegiatan perencanaan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Partisipasi dalam Kegiatan KUD

Kegiatan	Wanita	Pria
	%	%
Menyusun program kerja	52,3	58,6
Menyusun target	66,7	51,6
Menyusun pembagian kerja	64,4	41,4
Menyusun prosedur kerja	55,6	43,3
Memberikan saran rencana kerja	70,5	67,7

Tabel ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi wanita lebih tinggi dibandingkan dengan pria pada hampir semua kegiatan perencanaan kecuali menyusun program kerja. Hal ini mengindikasikan bahwa peranan wanita pada tataran menyusun rencana sudah tampak.

Adapun partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan merupakan bentuk partisipasi dalam implementasi dari perencanaan yang telah disusun. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa ada enam unsur pelaksanaan kegiatan KUD yaitu partisipasi wanita lebih tinggi dibandingkan pria. Keenam unsur tersebut adalah dimintai pendapat oleh manajer, berusaha meningkatkan pendapatan KUD,

menambah omzet penjualan, menggiatkan aktivitas karyawan, meningkatkan kesejahteraan karyawan, dan aktif dalam kegiatan utama KUD. Partisipasi wanita lebih rendah dibandingkan pria dalam dua unsur pelaksanaan kegiatan KUD yaitu "meningkatkan kegiatan KUD", dan unsur "meningkatkan kesejahteraan anggota" sedikit lebih tinggi pria dibandingkan wanita. Hal ini mengindikasikan bahwa wanita mempunyai tanggung jawab yang lebih tinggi dalam pelaksanaan kegiatan KUD dibandingkan pria.

Partisipasi dalam Pengawasan dan Pengambilan Keputusan

Tabel 4. Partisipasi dalam Pengawasan

Kegiatan	Wanita	Pria
	%	%
Aktif mengawasi kegiatan KUD	82,2	76,6
Memperhatikan target yang harus dicapai	82,2	73,3
Pernah terjadi penyimpangan	16,7	37,9
Usul RAT sesuai dengan AD/ART	57,8	60,6
Menilai pengurus	61,4	74,2
Menilai manajer	59,5	55,2
Memberi saran terhadap laporan BP	25	40,7

Partisipasi dalam pengawasan merupakan implementasi partisipasi ditinjau dari aspek manajerial. Dari tujuh aspek pengawasan yang dikaji, ada empat aspek tingkat partisipasi wanita lebih rendah dibandingkan pria, yaitu aspek: menemukan pernah terjadi penyimpangan; usul RAT sesuai dengan AD/ART;

memberikan penilaian kepada pengurus; dan memberikan saran terhadap laporan Badan Pemeriksa, sedangkan untuk tiga aspek yang lain tingkat partisipasi wanita lebih tinggi dibandingkan pria. Hal ini mengindikasikan bahwa akses dan kontrol wanita terhadap KUD masih lebih rendah dibandingkan pria.

Tabel 5. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Kegiatan	Wanita	Pria
	%	%
Menetapkan AD/ART	34,1	48,4
Ikut memilih pengurus	72,1	69,7

Dari data ini tampak bahwa dalam menetapkan AD/ART, tingkat partisipasi wanita lebih rendah dibandingkan pria. Adapun aspek ikut memilih pengurus, partisipasi wanita lebih tinggi dibandingkan pria. Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi wanita tinggi hanya pada tataran pelaksanaan sedangkan pada tataran pengambilan keputusan masih didominasi oleh pria. Dengan kata lain tingkat partisipasi wanita lebih rendah dibandingkan pria dari segi kualitas.

Faktor Pendorong dan Penghambat Partisipasi

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa kegiatan KUD yang menjadi faktor pendorong aktif di KUD antara wanita dan

pria berbeda. Wanita paling banyak memilih alasan bahwa "kegiatan usaha KUD sangat membantu pemenuhan kebutuhan ibu rumah tangga, sedangkan pria lebih banyak memilih alasan bahwa kegiatan usaha KUD sangat membantu pemenuhan semua anggota". Di sini tampak bahwa wanita belum mau memiliki visi yang bersifat publik, namun masih memikirkan kebutuhan dirinya sendiri (domestik).

Apabila dilihat dari faktor penghambat untuk berpartisipasi dalam KUD, ternyata alasan wanita juga berbeda dengan pria. Bagi wanita, faktor yang paling banyak menghambat adalah "kegiatan usaha KUD tidak mendukung kebutuhan ekonomi keluarga", sedangkan menurut pria yang paling menghambat adalah "kegiatan usaha KUD tidak mampu membantu pemenuhan kebutuhan kaum ibu". Hal ini menunjukkan bahwa pria lebih dapat memikirkan wanita daripada sebaliknya, tetapi wanita lebih memikirkan kebutuhan keluarga secara keseluruhan, tidak hanya pria (suami).

Peluang Sebagai Pemimpin

Profil peluang sebagai pemimpin di KUD dalam perspektif jender adalah untuk melihat sejauh mana kesempatan yang diberikan kepada wanita untuk berpartisipasi dalam memimpin KUD, baik menurut pendapat pria maupun menurut pendapat kaum wanita. Dalam penelitian ini ada tiga posisi kepemimpinan

dalam KUD yang diungkap, yaitu wanita sebagai manajer, wanita sebagai ketua pengurus, serta wanita sebagai ketua Badan Pemeriksa.

Data yang diperoleh ternyata menarik sekali untuk dikaji, karena menunjukkan pendapat yang cukup kontradiktif antara pria dan wanita. Menurut pendapat wanita, posisi yang paling banyak disetujui untuk diduduki wanita adalah posisi sebagai ketua Badan Pemeriksa, kemudian sebagai Manajer, dan terakhir posisi sebagai Ketua pengurus. Hal ini mengindikasikan bahwa sebenarnya wanita sudah siap untuk menduduki posisi paling kunci yaitu sebagai ketua Badan Pemeriksa, namun tampak pula bahwa peluang yang diberikan oleh pria justru pada tenaga operasional yaitu sebagai manajer, sedangkan posisi sebagai ketua Badan Pemeriksa menurut pendapat pria berada pada urutan terakhir.

Apabila digabungkan antara pendapat wanita dan pendapat pria maka posisi kepemimpinan dalam KUD yang berasal dari kaum wanita yang paling banyak disetujui adalah untuk posisi Manajer (75,9 %), urutan kedua untuk posisi ketua Badan Pemeriksa (69 %), dan terakhir adalah sebagai Ketua Pengurus (66,7 %). Hal ini menunjukkan bahwa peluang yang paling banyak diberikan kepada wanita adalah posisi tenaga pelaksana yang berarti hanya pada tataran akses, belum sampai pada tataran kontrol. Dapat dikatakan bahwa peranan wanita dalam

pembangunan masih sebagai pemanfaat dan penikmat hasil pembangunan belum diberikan kesempatan untuk berperan aktif sebagai pengambil keputusan atau penentu kebijaksanaan.

Peluang untuk Pengembangan Diri

Kesempatan untuk mengembangkan diri adalah salah satu pemberdayaan manusia, sehingga dapat menikmati hidup dengan sejahtera. Profil peluang pengembangan diri ini diungkap melalui kesempatan mengikuti pelatihan.

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa pria lebih banyak mendapat kesempatan untuk mengikuti pelatihan yaitu ada 62,1 %, sedangkan wanita yang mendapat kesempatan mengikuti pelatihan hanya 48,8 %. Apabila dilihat di antara wanita itu sendiri maka terlihat bahwa lebih banyak wanita yang tidak mendapat kesempatan pelatihan yaitu ada 51,25 %.

Hal ini mengindikasikan bahwa pemberdayaan terhadap wanita lebih rendah dibandingkan dengan pria. Dapat dikatakan pula bahwa pada saat ada kesempatan untuk peningkatan kualitas hidup, wanita cenderung terabaikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada kondisi empiris upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan wanita, ternyata masih banyak kendalanya.

SIMPULAN

Tingkat partisipasi wanita dibandingkan pria dilihat dari statusnya dalam KUD ataupun dari aspek manajerial secara kualitatif lebih tinggi pria. Partisipasi wanita lebih banyak pada tataran pelaksanaan, sedangkan pada tataran pengambilan keputusan masih didominasi oleh pria. Hal ini diduga karena wanita kurang memahami AD/ART. Wanita lebih memikirkan kebutuhan keluarga (domestik) daripada kebutuhan organisasi (publik). Adapun pria lebih memikirkan kepentingan organisasi daripada kepentingan keluarga. Hal ini mengindikasikan bahwa cara berpikir wanita masih subjektif. Ditinjau dari peluang menjadi pemimpin, data yang diperoleh menunjukkan pendapat yang kontraproduktif antara pria dan wanita. Menurut pendapat wanita, posisi yang paling banyak disetujui untuk diduduki wanita adalah sebagai Badan Pemeriksa. Akan tetapi, menurut pendapat pria, posisi yang disetujui adalah sebagai manajer. Hal ini mengindikasikan bahwa sebenarnya wanita sudah siap untuk menjadi pemimpin kunci (Badan Pemeriksa), tetapi kesempatan yang diberikan hanya sebagai pelaksana (Manajer). Kondisi ini masih diperparah lagi dengan wanita masih cenderung terabaikan untuk mendapatkan kesempatan pengembangan diri dalam berbagai bentuk pelatihan. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan wanita,

ternyata pada kondisi empiris masih banyak kendalanya. Dengan demikian, untuk mewujudkan kemitrasejajaran yang harmonis, serasi, dan seimbang antara pria dan wanita, masih perlu adanya berbagai upaya dari berbagai pihak yang berwenang agar bisa dimengerti dan diterapkan oleh seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Aziz. (1983). *Meninjau Kembali Kebijakan Operasional Pengembangan KUD: Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*. Jakarta: UI Press.
- Bambang Puji Raharjo. (1986). *Perbedaan Partisipasi Anggota yang Sudah dan Belum Mengikuti Pendidikan Koperasi di Kopma IKIP YOGYAKARTA*. (Skripsi). Yogyakarta: FPIPS IKIP YOGYAKARTA.
- Departemen Koperasi. (1992). *UU RI No. 25/1992: Tentang Perkoperasian*. Jakarta: Departemen Koperasi.
- Devis, Keith. (1967). *Human Relation At Work: The Dynamic Organization Behavior*. New York: Mc. Graw Hill.
- Gerungan, WA. (1972). *Psikologi Sosial*. Bandung: Eresco.
- Ibnoe Sujono. (1983). *Membina dan Mengembangkan Partisipasi Anggota Koperasi*. Warta Koperasi. No. 12 th. IV.
- Kartini Kartono. (1983). *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*. Cetakan ketujuh. Jakarta: Gramedia.

Kantor Men.UPW. (1995). *Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan Bangsa Berwawasan Kemitrasejajaran yang Harmonis antara Pria dan Wanita dengan Pendekatan Jender*. Jakarta: Kantor Men.UPW.

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. (1981). *Metode Penelitian Survei*. LP3ES. Jakarta: Tarsito.

Parker S.R., dkk. (1985). *Sosiologi Industri*. Jakarta: PT Bina Aksara.